



BADAN POM

LAPORAN **KINERJA** Interim Triwulan I **2021**

BALAI POM DI MAMUJU



Jalan Poros Mamuju-Kalukku KM. 13,
Bambu, Sulawesi Barat



(0426) 2322759



bpom_mamuju@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dapat menyelesaikan tugas-tugas selama Triwulan I Tahun 2021 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021.

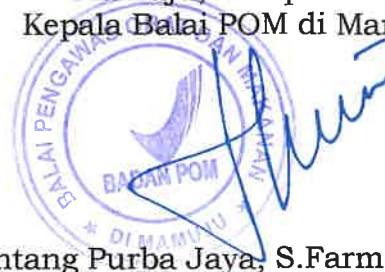
Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi kinerja dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja oleh Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2021. Selama 3 (Tiga) Bulan Balai POM di Mamuju telah menjalankan tugas pokok dan fungsi melalui berbagai kegiatan di dalam upaya memenuhi Visi *"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021, diharapkan akan memberikan informasi atas kinerja yang telah tercapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Mamuju, 19 April 2021
Kepala Balai POM di Mamuju,



Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt.,M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	3
1.3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	5
1.4. ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN UTAMA	7
1.5. STRUKTUR ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. RENCANA STRATEGIS	13
2.2. BUDAYA ORGANISASI	22
2.3. TUJUAN	23
2.4. SASARAN STRATEGIS	23
2.5. RENCANA KERJA TAHUNAN	37
2.6. PERJANJIAN KINERJA	42
2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	47
2.8. KERANGKA PENDANAAN	53
2.9. METODE PENGUKURAN	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	64
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	64
3.2. REALISASI ANGGARAN	125
BAB IV PENUTUP	134
4.1. KESIMPULAN	134
4.2. SARAN	135
LAMPIRAN	137

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang menjabarkan Visi dan Misi organisasi ke dalam tujuan dan sasaran strategis/program/kegiatan Balai POM di Mamuju. Tujuan dan sasaran ini dapat dicapai dengan melaksanakan suatu kerja yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan. Anggaran diperlukan sebagai input kegiatan untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Balai POM di Mamuju mendapatkan total anggaran DIPA Awal tahun 2021 sebesar Rp16.012.584.000 dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp1.257.338.707 atau 7,85%.

Adanya pandemi Covid-19 dan Gempa Bumi tanggal 15 Januari 2021 yang berdampak pada kerusakan talud dan 3 (tiga) gedung laboratorium Balai POM di Mamuju, tidak menurunkan semangat Balai POM di Mamuju untuk mencapai kinerja yang optimal. Peristiwa tersebut diubah menjadi kekuatan Balai POM di Mamuju untuk semakin kompak dan semangat berbagi bagi teman-teman dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai 1 (Dua) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK yaitu SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju. Hal ini sesuai dengan misi Balai POM di Mamuju yaitu:

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Balai POM di Mamuju senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan mendatang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Adapun keberhasilan yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai POM di Mamuju yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Budaya Kerjasama tim yang tercipta di Balai POM di Mamuju, sehingga dalam mencapai target dapat dilaksanakan seoptimal mungkin oleh semua kelompok substansi
2. Sebagian besar ASN milenial yang responsif dan cepat beradaptasi terhadap perubahan
3. Sistem Pengawasan berbasis risiko yang dilaksanakan secara profesional dan kredibel oleh Balai POM di Mamuju untuk melindungi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat
4. Balai POM di Mamuju senantiasa meningkatkan pemahaman konsumen dan produsen/distributor Obat dan Makanan melalui penyampaian Informasi secara langsung maupun melalui sosial media
5. SDM Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan professional dan selalu berusaha menghindari konflik kepentingan maupun gratifikasi yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya
6. Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan lintas sektor yang baik

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan Prinsip-Prinsip Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan Kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektifitas serta Profesionalisme. Hal ini menunjukkan tekad Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LAPKIN, dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat.

Laporan Kinerja disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, sehingga instansi pemerintah tersebut mampu eksis dan unggul

diera perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. Balai POM di Mamuju merupakan salah satu UPT Badan POM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai POM di Mamuju dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi III dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijelaskan Balai POM di Mamuju mempunyai **tugas** dan **fungsi** sebagai berikut :

Tugas :

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian

- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Balai POM di Mamuju sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peran dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 4 (empat) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut, Balai POM di Mamuju sebagai unit pengawas obat dan makanan di Mamuju perlu melakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja dimasa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama, dan tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai

penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai POM di Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, Distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Mamuju.

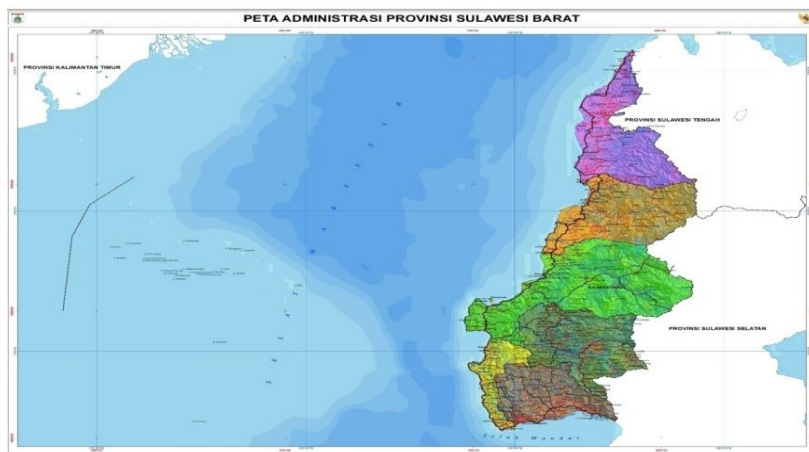
1.3 Analisis Lingkungan Strategis

Sejak tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menjadi satker mandiri dengan DIPA sendiri. Dalam melaksanakan operasional kegiatan Balai POM di Mamuju telah menempati Gedung Baru yang beralamat di Jalan Poros Kalukku KM 13 Desa Bambu sejak awal tahun 2020. Gedung yang ditempati untuk operasional kegiatan perkantoran saat ini merupakan realisasi pembangunan tahap 1 (satu) yaitu pembangunan 3 Gedung Laboratorium (Laboratorium Teranakoko, Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi) dan rencana kedepannya akan dilanjutkan untuk pembangunan Tahap 2 yaitu

Gedung Kantor dan Gedung Layanan Publik. Tahap ke-3 adalah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya.

Adanya Gempa Bumi tanggal 15 Januari 2021 menyebabkan kerusakan berat pada Gedung Laboratorium Mikrobiologi dan kerusakan ringan pada Gedung Laboratorium Pangan dan Teranokoko. Hal ini menyebabkan sebagian besar pengujian masih harus dilakukan di Balai Besar POM di Makassar.

Letak Geografis



Gambar 1. 1 Peta Provinsi Sulawesi Barat

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- Sebelah Utara : Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km persegi (sulbar.bps.go.id, 2020). Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 (Enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten

Majene dan Kabupaten Mamuju, terdiri dari 69 Kecamatan dan 650 Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) (sulbar.bps.go.id, 2017). Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari aktivitas perdagangan obat dan makanan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini menjadi poin penting bagi Balai POM di Mamuju untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Beberapa aspek penting yang menjadi *concern* pengawasan Balai POM di Mamuju antara lain :

- Jalur perdagangan obat dan makanan di Wilayah Indonesia Timur
- Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar Sulawesi Barat
- Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao dan minyak sawit sehingga diperlukan pengawasan sebelum diolah dengan bersinergi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait

1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Perubahan dinamis pada lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Mamuju. Lingkungan strategis dengan berbagai isu strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju. Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Mamuju tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum

sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun isu strategis tahun 2021 diantaranya sebagai berikut.

1. Pandemi Virus Covid-19

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju sehingga capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 belum optimal. Hal ini disebabkan oleh Pemberlakuan New Normal baru mulai berlaku sejak bulan Juni 2020 hingga akhir tahun 2020

2. Adanya Bencana Gempa Bumi 6.2 Magnitudo di Provinsi Sulawesi Barat yang menyebabkan 3 gedung laborium mengalami kerusakan, diantaranya 1 rusak berat dan 2 rusak ringan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan perkantoran selama kurang lebih 1 bulan hingga status tanggap darurat dicabut
3. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke Wilayah Sulawesi Barat termasuk di dalamnya adalah produk ilegal
4. Adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum dapat dikawal secara intensif oleh Balai POM di Mamuju
5. Semakin banyak produsen peracik kosmetik rumahan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
6. Maraknya perdagangan Obat, Makanan, Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya secara *Online*
7. Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) dan penyalahgunaan obat semakin marak terjadi, distribusi OOT tersebut dilakukan oleh orang perorangan, bukan oleh sarana yang berhak
8. Balai POM di Mamuju saat ini sudah mempunyai laboratorium pengujian, namun 1 (satu) gedung laboratorium mikrobiologi yang digunakan untuk pengujian Covid-19 memiliki kerusakan berat sehingga laboratorium pengujian Covid-19 harus dipindahkan ke gedung laboratorium pangan.

Sehingga sampai dengan triwulan I Tahun 2021 sebagian pengujian dilakukan di BBPOM di Makassar .

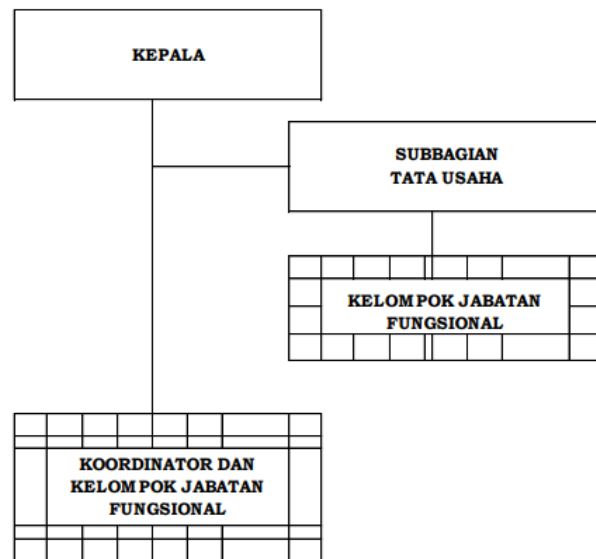
9. Balai POM di Mamuju terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasardan kode etik aparatur negara.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai POM di Mamuju dalam melakukan pembenahan di masa mendatang dan menyusun strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan adanya Pandemi Covid-19 dan Pasca Gempa Bumi sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Berdasarkan penjelasan di atas, kapasitas Balai POM di Mamuju sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Barat masih perlu terus dilakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya agar pencapaian kinerja di masa datang dapat lebih optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.2 di bawah ini, secara garis besar

unit-unit kerja Balai POM di Mamuju dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Balai POM di Mamuju tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis Balai POM di Mamuju yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*).

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Mamuju dalam satu tahun tertentu, dan melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Pendekatan manajemen kinerja dalam Renstra Balai POM di Mamuju menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Perjanjian Kinerja. Mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasiskan organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program.

2.1. Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPOM di Daerah dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Mamuju. Adapun penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut.

2.1.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

2.1.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process,*

infrastructure;

5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan Kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan

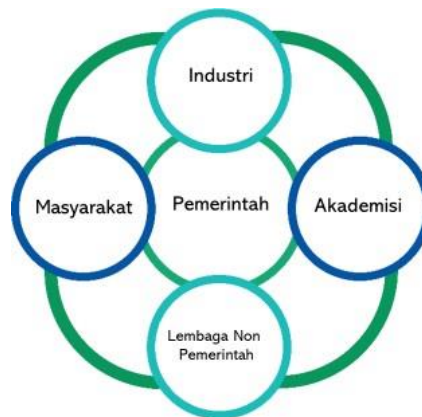
Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024, 2020

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

5. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk

petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 % dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 %.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

6. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-

aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

7. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat

maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.2. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
8. Inovatif
Mampumelakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
9. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.3. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai Tahun 2021 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) antara lain sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024**

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders <i>Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Internal Process Perspective	dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
	SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.6 Indeks Pelayanan Publik Balai POM

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		
				di Mamuju
	SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	
		IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	
		IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	
		IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	
	SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	
		IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	
	SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju
			IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju

Sumber: Sasaran Kegiatan, 2021

Adapun penjelasan untuk setiap sasaran kegiatan sebagai berikut.

1. Stakeholder Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Mamuju tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu,

konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Balai POM di Mamuju. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

- a. **Persentase obat yang memenuhi syarat**
- b. **Persentase makanan yang memenuhi syarat**
- c. **Persentase obat makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**
- d. **Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM dan Balai POM di Mamuju yaitu “Meningkatnya jaminan

produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju**

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Sebagai salah satu UPT dari Lembaga pemerintah non kementerian, Balai POM di Mamuju berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Mamuju, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Mamuju bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai

POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 6) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju**
- b. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju**

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 3) Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju**

c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju**

d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Mamuju menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga

mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

3. *Learning & Growth Perspective*

a. Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Mamuju sebagai salah satu UPT BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, Balai POM di Mamuju berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM di Mamuju agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM di Mamuju untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Mamuju. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) Indeks RB Balai POM di Mamuju

2) Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir,

pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju**

c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Mamuju di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal**

d. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM di Mamuju dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju

2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju

2.5. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. RKT memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2021, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	83,6
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	80
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu	82

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
				berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	80
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	73
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	84,5
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup	74

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		POM di Mamuju		Balai POM di Mamuju	
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,75
Internal Process Perspective	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	80
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	60,7
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	82
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	55
			IKSK4.5	Persentase sarana	53

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
				distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3,46
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	79,18
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	40
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	12
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	2
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	85
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
Learning and Growth Perspective		POM di Mamuju		di lingkup Balai POM di Mamuju	
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	49
	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	77
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	75
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang	2

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		Balai POM di Mamuju		optimal	
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94
			IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (92%)

Sumber: Dokumen RKT Balai POM di Mamuju Tahun, 2021

2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Mamuju sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Mamuju) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai atau setelah alokasi anggaran. Adapun Lampiran Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	83,6
		IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	80
		IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	82
		IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	80
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	73

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
	POM di Mamuju			
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	84,5
		IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	74
		IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,75
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	80
		IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	60,7

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	82
		IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	55
		IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	53
		IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3,46
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	79,18
		IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	40
		IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	12
		IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	2

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	85
		IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	77
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	49
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89
		IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84
SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	77

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	75
		IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94
		IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (92%)

Sumber: Dokumen PK Balai POM di Mamuju, 2021

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk pemantauan secara berkala, telah dibuat Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang digunakan oleh pimpinan puncak untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja pertriwulan.

2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen perencanaan pencapaian kinerja pertriwulan. Adanya dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan sebagai sarana yang akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian

kinerja setiap tiga bulan. Diharapkan dengan adanya RAPK capaian kinerja dapat lebih optimal.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	83,6	83,6	83,6	83,6
		IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	80	80	80	80
		IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	82	82	82	82
		IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	80	80	80	80
SK2	Meningkatnya	IKSK	Indeks kesadaran	-	-	-	73

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
	kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	2.1	masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju				
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	-	84,5
		IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	-	74
		IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	86,75
SK4	Meningkatnya	IKSK	Persentase	80	80	80	80

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
	efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	4.1	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju				
		IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	60,7	60,7	60,7	60,7
		IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	82	82	82	82
		IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	55	55	55	55

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
		IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	53	53	53	53
		IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	-	-	-	3,46
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	79,18	79,18	79,18	79,18
		IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	20	60	80	40
		IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	20	60	80	12
		IKSK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	20	60	80	2
SK6	Meningkatnya	IKSK	Persentase sampel	21,33	51,87	71,18	85

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
	efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	6.1	Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju				
		IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	21,33	49,33	66,67	77
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	20	30	40	49
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	-	-	-	89
		IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	-	-	-	84
SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	-	-	-	77

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	-	-	-	75
		IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2	2	2	2
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	25	50	75	94
		IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efektif (92%)	Efektif (92%)	Efektif (92%)	Efektif (92%)

2.8. Kerangka Pendanaan

Sesuai Target Kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka Kerangka Pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Kegiatan 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	135,343,762
		IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	87,436,429
		IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	135,343,762
		IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	87,436,429
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan	368,500,000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
	dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	64,547,900
		IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	127,065,400
		IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	337,500,000
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	138,129,900

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
	serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju		dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	
		IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	138,129,900
		IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	11,064,500
		IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	22,483,400
		IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM	104,582,000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
			di Mamuju	
		IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	368,500,000
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	368,500,000
		IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	688,161,000
		IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	876,091,000
		IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	105,098,000
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	135,343,762

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
	Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	87,436,428
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	218,613,000
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	3,063,000,000
		IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	543,507,500
SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	543,507,500
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan	2,145,784,428

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
	informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju		Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	
		IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	1,703,826,000
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	1,703,826,000
	secara Akuntabel	IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	1,703,826,000
Jumlah				16,012,584,000

Sumber :RAPK Balai POM di Mamuju, 202

2.9 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Setiap akhir periode kegiatan instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pada tahun 2021 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Adapun cara pengukuran dan Kriteria pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Cara Pengukuran % Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).

Cara Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut.

$$1) \text{ NPS Per Sasaran} = \{ \% \text{ capaian indikator1} + \% \text{ capaian indikator2} + \dots \% \text{ capaian indikatorn} \} / n$$

Keterangan :

- Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran → NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
- Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator → NPS ditentukan dengan menghitung **rata-rata persentase** capaian seluruh indikator.
- Indikator dengan capaian >120%, penghitungan **NPS menggunakan nilai maks 120%**

$$2) \text{ NPS per Perspektif} = \{ \% \text{capaian sasaran}_1 + \% \text{capaian sasaran}_2 + \dots \% \text{capaian sasaran}_n \} / n$$

Keterangan :

- Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran → NPS ditentukan dengan menghitung **rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.**

$$3) \text{ NPS Total} = \{ \text{NPS Perspektif}_1 + \text{NPS Perspektif}_2 + \text{NPS Perspektif}_3 \} / 3$$

Keterangan :

- NPS total ditentukan dengan menghitung **rata-rata persentase capaian seluruh perspektif.**

Tabel 2.6 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120

Penetapan kriteria ini bertujuan untuk :

1. Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. *Me-review* penetapan target kinerja tahunan.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BPOM di Mamuju yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
2. Kepala BPOM di Mamuju menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap seksi dengan menerbitkan SK Kepala BPOM di Mamuju;
3. Penanggung jawab data di setiap seksi menginput data kinerja pada *bit.ly data base online* Balai POM di Mamuju secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, aplikasi SAS dan setiap triwulan pada aplikasi e-performace;
5. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan;

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Mamuju guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2021 sebagai periode ke-2 Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun 2021 dan dengan target tahun 2021. Kemudian dilakukan juga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang

terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan ditetapkannya 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan, yang semua indikator kinerja yang ditetapkan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga dalam pengukuran pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2021 dihitung berdasarkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja dengan target seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pada tahun Triwulan I Tahun 2021 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai 1 sasaran kegiatan dengan kriteria BAIK, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria CUKUP, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria KURANG, 2 sasaran kegiatan dengan kriteria SANGAT KURANG, dan 5 sasaran kegiatan yang akan tercapai di akhir tahun. Adapun detail Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

Tabel 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83.60	83.60	19.00	19.00	100.00	119.62	119.62	SANGAT BAIK
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	3.00	3.00	100.00	121.95	121.95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	3.00	7.00	42.86	53.57	53.57	KURANG
SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							73.78	73.78	CUKUP

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	73.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.50	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
Stakeholders Perspective							73.78	73.78	CUKUP
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	-	-	95.00	118.75	118.75	SANGAT BAIK
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.70	60.70	-	-	5.56	9.16	9.16	SANGAT KURANG
IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	55.00	55.00	1.00	1.00	100.00	181.82	181.82	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	53.00	53.00	28.00	37.00	75.68	142.78	142.78	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.46	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							90.50	90.50	BAIK
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	79.18	79.18	-	-	-	Capaian TW I Belum Keluar	Capaian TW I Belum Keluar	-

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40.00	20.00	-	-	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	12.00	20.00	-	-	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2.00	20.00	-	-	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							0.00	0.00	SANGAT KURANG
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	21.33	-	-	34.21	160.38	40.25	SANGAT KURANG
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	77.00	21.33	-	-	12.61	59.12	16.38	SANGAT KURANG

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							109.75	28.31	SANGAT KURANG
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	49.00	20.00	-	-	42.50	212.50	86.73	CUKUP
SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							212.50	86.73	CUKUP
Internal Process Perspective							103.19	51.39	KURANG
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal							Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	77.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal							Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	75.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.00	2.00	-	-	-	Capaian TW I Belum Keluar	Capaian TW I Belum Keluar	-
SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju							Capaian TW I Belum Keluar	Capaian TW I Belum Keluar	-
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94.00	25.00	-	-	35.53	142.13	37.80	SANGAT KURANG
IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	92.00	92.00	-	-	75.00	81.52	81.52	CUKUP

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
	Balai POM di Mamuju								
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel							111.82	59.66	KURANG
Learning and Growth Perspective							111.82	59.66	KURANG
NPS Total							96.27	61.61	KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berikut akan dibahas analisa lebih detail terkait capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU.

SASARAN KEGIATAN 1

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

Capaian dari Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Sasaran Kegiatan 1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83.60	83.60	19.00	19.00	100.00	119.62	SANGAT BAIK
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	3.00	3.00	100.00	121.95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	3.00	7.00	42.86	53.57	KURANG
SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							73.78	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian kinerja 4 (empat) Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan 1 triwulan I 2021 berkisar antara 0% s/d 121.95%. Rata-rata capaian indikator kinerja merupakan capaian dari SK1 yaitu dengan capaian 73.78% dan termasuk dalam kriteria “Cukup”. Capaian tertinggi terdapat pada indikator persentase obat yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju yaitu sebesar 121.95% namun termasuk kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Balai POM di Mamuju akan terus berupaya mengoptimalkan pengawasan

dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan yang aman dan bermutu sehingga capaian di akhir Tahun sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada sasaran kegiatan I yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, SK 1 terdiri atas 4 indikator kegiatan sebagai berikut.

1. Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju

Berikut akan diuraikan analisa capaian pada setiap Indikator Kinerja SK1.

IKU 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

IKU 1 “Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83.60	83.60	19.00	19.00	100.00	119.62	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Target sampel obat acak Balai POM di Mamuju pada tahun 2021 adalah sebanyak 277 sampel. Dimana realisasi pada TW 1 diperoleh sampel obat yang memenuhi syarat sebanyak 19 sampel dari 94 total sampel yang telah dilakukan *sampling*. Sebenarnya pada Bulan Januari - Februari tidak dilakukan kegiatan pengujian karena fasilitas tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian. Bulan Maret baru dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Makassar.

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju berdasarkan tabel di atas adalah 119,82% dengan kategori sangat baik. Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat hingga 119,82% ini, yaitu seluruh kegiatan pengujian Obat dilakukan di Balai Besar POM di Makassar karena kondisi gedung laboratorium Balai POM di Mamuju yang tidak kondusif tepatnya 1 gedung rusak berat dan 2 gedung rusak ringan akibat bencana alam Gempa Bumi 6.2 Magnitudo yang melanda Majene dan sekitarnya sehingga seluruh kegiatan pengujian harus dilaksanakan di BBPOM di Makassar.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu:

- Tetap melakukan pengujian sampel Obat di Balai Besar POM di Makassar tahun sampai gedung laboratorium di Balai POM di Mamuju selesai dilakukan perbaikan
- Percepatan pengadaan reagen untuk pengujian

IKU 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

IKU 2“Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Target sampel Makanan acak pada tahun 2021 adalah sebanyak 70 sampel dan realisasi *sampling* sebanyak 18 sampel untuk TW 1. Dari 18 sampel, belum ada realisasi dari hasil pengujian sampel Makanan yang memenuhi syarat pada TW 1 sehingga capaiannya 0% masuk dalam kriteria “Sangat Kurang”. Sebenarnya pada Bulan Januari - Februari tidak dilakukan kegiatan pengujian karena fasilitas tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian. Bulan Maret baru dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Makassar.

Adapun beberapa kendala/hambatan yang menjadi penyebab belum adanya sampel Makanan acak yang diperiksa oleh Balai POM di Mamuju adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan reagen pengujian karena sedang dalam proses pengadaan

- Keterbatasan peralatan pengujian sehingga ada beberapa parameter yang tidak dapat dilakukan pengujiannya
- Terdampak bencana gempa bumi 6.2 Magnitudo di Sulawesi Barat
- Jadwal Rencana pelaksanaan *sampling* mundur akibat gempa
- Tenaga penguji pangan mendapat tugas tambahan sebagai penguji sampel Covid-19
- Tenaga penguji pangan masih ada dalam masa kepenyeliaan
Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut yaitu :
 - Dilakukan pembagian jadwal pengujian sampel Covid-19 per dua bulan
 - Koordinasi dengan petugas *sampling* dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan *sampling* tepat waktu
 - Percepatan pengadaan reagen untuk pengujian

IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	3.00	3.00	100.00	121.95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Target sampel obat targeted pada tahun 2021 adalah sebanyak 103 sampel. Dimana realisasi pada TW 1 diperoleh sampel obat yang memenuhi syarat sebanyak 3 sampel dari 3 sampel yang dilakukan pengujian. Sedangkan total sampling sebanyak 27 sampel. Sebenarnya pada Bulan Januari - Februari tidak dilakukan kegiatan pengujian karena fasilitas tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian. Bulan Maret baru dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Makassar.

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian persentase Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju sebesar 121,95% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu seluruh kegiatan pengujian Obat dilakukan di Balai Besar POM di Makassar karena kondisi gedung laboratorium Balai POM di Mamuju yang tidak kondusif tepatnya 1 gedung rusak berat dan 2 gedung rusak ringan akibat bencana alam Gempa Bumi 6.2 Magnitudo yang melanda Majene dan sekitarnya sehingga seluruh kegiatan pengujian harus dilaksanakan di BBPOM di Makassar.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu

- Akan tetap melakukan pengujian sampel Obat di Balai Besar POM di Makassar tahun ini selama gedung laboratorium di Balai POM di Mamuju dalam masa perbaikan.
- Percepatan pengadaan reagen untuk pengujian.

IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	3.00	7.00	42.86	53.57	KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Target sampel Makanan targeted yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai POM di Mamuju pada tahun 2021 adalah sebanyak 91 sampel. Dari 7 sampel yang selesai diuji pada TW 1 terdapat 3 sampel yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 53,57% termasuk kriteria “Kurang”. Sebenarnya pada Bulan Januari - Februari tidak dilakukan kegiatan pengujian karena fasilitas tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian. Bulan Maret baru dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Makassar.

Adapun beberapa kendala/hambatan yang menjadi penyebab tidak adanya sampel Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan reagen pengujian karena sedang menunggu pengadaan

- Keterbatasan alat sehingga ada beberapa parameter yang tidak dapat dilakukan pengujiannya
- Terdampak bencana gempa bumi 6.2 Magnitudo di Sulawesi Barat
- Mundurnya Jadwal pelaksanaan sampling akibat gempa
- Tenaga penguji pangan mendapat tugas tambahan sebagai penguji sampel Covid-19
- Tenaga penguji pangan masih ada dalam masa kepenyeliaan Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut yaitu:
 - Pembagian jadwal pengujian sampel Covid-19 per dua bulan
 - Koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
 - Percepatan pengadaan reagen untuk pengujian

SASARAN KEGIATAN 2

“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 2 (SK2) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Tabel 3.7 Sasaran Kegiatan 2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	73.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja pada SK2 TW 1 tahun 2021 belum tercapai karena Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju target realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021 yaitu sebesar 78.

SASARAN KEGIATAN 3

“Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 3 (SK3) didasarkan pada penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 tahun 2021 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Sasaran Kegiatan 3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.50	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja pada SK3 TW 1 tahun 2021 belum tercapai karena semua indeks di wilayah kerja Balai POM di Mamuju realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021.

Berikut akan diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK3.

IKU 6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/ seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Cara perhitungan indikator ini sebagai berikut.

- a. Dilakukannya survei yang dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *e-mail blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *e-mail blast* kepada semua pelaku

usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.

- b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%.
- c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.
- d. Kriteria yang digunakan adalah
 - 75,01 – 100 : sangat puas
 - 50,01 – 75 : puas
 - 25,01 – 50 : kurang puas
 - 0 – 25 : tidak puas

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.50	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021.

IKU 7. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) ,

memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021.

IKU 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021.

SASARAN KEGIATAN 4

“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 4 (SK4) didasarkan pada penilaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11 Sasaran Kegiatan 4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	-	-	95.00	118.75	118.75	SANGAT BAIK
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.70	60.70	-	-	5.56	9.16	9.16	SANGAT KURANG
IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	55.00	55.00	1.00	1.00	100.00	181.82	181.82	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	53.00	53.00	28.00	37.00	75.68	142.78	142.78	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.46	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							90.50	90.50	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Pada sasaran kegiatan 4 Balai POM di Mamuju mencakup kegiatan pengawasan baik sarana distribusi maupun sarana produksi yang berada di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Barat. Untuk fasilitas sarana distribusi yang dilakukan pemeriksaan adalah fasilitas pelayanan kefarmasian maupun fasilitas penyaluran sediaan farmasi serta fasilitas distribusi produk makanan, sedangkan untuk sarana produksi yang menjadi target pengawasan adalah industri pangan MD serta industri pangan IRTP.

Berikut diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK4.

IKU 9. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Sedangkan yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan adalah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat/UPT atau lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Indikator kinerja “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan =

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Total rekomendasi yang diterbitkan atau diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	-	-	95.00	118.75	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Penyebab keberhasilan Pemenuhan terhadap indikator kinerja disebabkan oleh kepatuhan petugas untuk membuat rekomendasi hasil inspeksi setelah melaksanakan pengawasan di sarana distribusi maupun sarana produksi. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja yaitu melakukan inventarisasi dan pengarsipan dokumen hasil pemeriksaan secara tertib terkait hasil pemeriksaan sarana yang dilaksanakan oleh petugas.

Tindak lanjut terkait pencapaian yaitu dengan rutin mengingatkan petugas yang terkait dengan kegiatan pengawasan untuk selalu membuat tindak lanjut secara tertib dan/atau sesuai dengan SOP mikro yang telah dibuat setelah melaksanakan pengawasan serta selalu melakukan tindak lanjut terkait surat rekomendasi yang dikirimkan oleh pusat maupun dari pemangku kepentingan.

IKU 10. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan

Makanan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Tindak lanjut yang dimaksud adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Indikator kinerja “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh *Stakeholder*” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* =

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah tindak lanjut dari lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan kepada lintas sektor}} + \frac{\text{Jumlah tindak lanjut dari pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha}} \right\} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.70	60.70	-	-	5.56	9.16	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Penyebab rendahnya capaian dari indikator antara lain:

- Masih banyak stakeholder yang masih belum mampu melakukan perbaikan terkait temuan sarana ketika petugas dari BPOM

Mamuju melaksanakan pemeriksaan di sarana karena pada umumnya yang menjadi temuan merupakan temuan terkait pengadaan suatu alat atau perbaikan fisik terhadap sarana yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama daripada waktu yang telah disepakati terutama untuk sarana pelayanan atau fasilitas distribusi milik pemerintah.

- Masih rendahnya pemahaman dari pemerintah daerah terkait pemanfaatan aplikasi SMART BPOM sebagai wadah untuk melaporkan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan.
- Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dari BPOM

Program yang menyebabkan rendahnya pencapaian kinerja yaitu aplikasi SMART BPOM yang masih belum termanfaatkan dengan optimal oleh pemerintah daerah.

Tindak lanjut yang akan dilakukan terkait evaluasi yaitu:

- Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan komitmen pemanfaatan aplikasi SMART BPOM dengan menunjuk *Person In Charge* (PIC) di setiap masing-masing *stakeholder* terkait.
- Rutin melakukan komunikasi dan koordinasi kepada stakeholder terkait perbaikan temuan yang diperoleh di sarana dan menyampaikan untuk mengirimkan bukti perbaikan/CAPA.

IKU 11. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah keputusan sertifikasi yang dikeluarkan tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat keterangan Ekspor (SKE).

Indikator kinerja “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Penyebab rendahnya capaian indikator diakibatkan hingga akhir TW I, Pelaku usaha yang mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE) di BPOM Mamuju belum memiliki dokumen yang lengkap terkait

perizinan maupun dokumen persyaratan pendaftaran NIE sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat di lakukan Pemeriksaan Sarana Balai dalam rangka sertifikasi

Tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu dengan membentuk fasilitator untuk melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk di BPOM Mamuju serta melaksanakan pre audit kepada pelaku usaha yang akan melakukan pendaftaran produk, sehingga pelaku usaha dapat memahami tahapan proses pengajuan permohonan dan pendaftaran produk.

IKU 12. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase Sarana Produksi OMKA yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	55.00	55.00	1.00	1.00	100.00	181.82	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Penyebab capaian kinerja yang tidak disimpulkan diakibatkan masih kurangnya jumlah sarana produksi yang telah di lakukan pemeriksaan dikarenakan kegiatan pengawasan sarana di TW I masih berfokus pada Intensifikasi Pengawasan Distribusi Vaksin COVID 19.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya yaitu Membuat perencanaan pengawasan sarana produksi yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Triwulan selanjutnya (pada TW II s/d TW IV).

IKU 13. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase Sarana Distribusi Obat yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi yang diperiksa}} \times 100\%$$

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	53.00	53.00	28.00	37.00	75.68	142.78	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Penyebab capaian kinerja yang tidak dapat disimpulkan diakibatkan oleh fokus pengawasan sarana distribusi di TW I masih berfokus di sarana Pelayanan Pemerintah yang melaksanakan kegiatan Vaksinasi COVID 19, dimana kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan Intensifikasi Pengawasan Vaksin COVID-19 yang pelaksanaannya terfokus pada fasilitas penyimpanan vaksin saja dan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya yaitu membuat perencanaan di Triwulan

selanjutnya untuk melaksanakan pengawasan di sarana distribusi lainnya selain Sarana Distribusi yang menyalurkan vaksin COVID-19.

IKU 14. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- Profesionalitas SDM (18%);
- Sarana Prasarana (15%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- Inovasi (7%).

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.6

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK.4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.46	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021.

SASARAN KEGIATAN 5

"Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan".

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 5 (SK5) didasarkan pada penilaian terhadap 4 (empat) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.16 Sasaran Kegiatan 5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	79.18	79.18	-	-	-	Capaian TW I Belum Keluar	Capaian TW I Belum Keluar	-
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40.00	20.00	-	-	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	12.00	20.00	-	-	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2.00	20.00	-	-	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							0.00	0.00	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Dari Tabel 3.10 terlihat bahwa sasaran kegiatan 5 “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan” yang terdiri dari 4 indikator kinerja memiliki rata-rata kriteria capaian target tahunan “sangat kurang” disebabkan belum adanya realisasi pada masing-masing indikator kinerja, dikecualikan untuk indikator pertama yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Berikut diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK5.

IKU 15. Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media

cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Capaian indikator ini berasal dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP BPOM RI.

Indikator kinerja “Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif =

$$\frac{\text{Jumlah responden yang meningkat pemahamannya}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	79.18	79.18	-	-	-	Capaian TW I Belum Keluar	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Target efektifitas KIE obat dan Makanan di Wilayah kerja balai POM di Mamuju adalah 79,18. Pada TW I tahun 2021 target efektifitas KIE belum dapat disimpulkan karena masih menunggu data hasil penilaian dari Badan POM.

Balai POM di Mamuju telah melakukan survey tingkat efektifitas KIE pada beberapa kegiatan KIE yang telah dilaksanakan di TW I baik secara luring maupun *online* (melalui media sosial) dengan mengacu pada pedoman singkat penggunaan aplikasi Efektifitas KIE.

IKU 16. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah dengan PJAS Aman adalah sekolah yang mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader cilik keamanan pangan dari kelompok siswa dan fasilitator keamanan pangan dari kelompok guru. Selain itu akan dilakukan pengawalan/pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut aman melalui program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Capaian Indikator kinerja “Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman” dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator kinerja tahun 2021.

Tabel 3.18 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40.00	20.00	-	-	0.00	0.00	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Pada triwulan I belum dilakukan tahapan program PJAS karena sebelumnya menunggu pelaksanaan *kick off meeting* Keamanan Pangan Terpadu yang akan dibuka oleh Kepala Badan POM RI. Setelah pelaksanaan *kick off meeting*, selanjutnya dilakukan koordinasi ke pemerintah daerah yang menjadi lokus intervensi. Bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten dan Provinsi serta Kantor Kementerian Agama telah ditetapkan 24 sekolah/madrasah yang akan mendapatkan intervensi PJAS Tipe A yang terdiri 10 sekolah/madrasah setingkat SD/ sederajat, 7 SMP/ sederajat dan 7 SMA/ sederajat. Dari hasil koordinasi tersebut juga telah diperoleh kesepakatan terkait waktu pelaksanaan Advokasi Kegiatan Terpadu PJAS, GKPD, dan PPABK yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 12 April 2021.

IKU 17. Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja ketiga dalam pencapaian Sasaran Kegiatan keenam adalah “Jumlah desa pangan aman” dengan target sebanyak 1 desa. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM

adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki kriteria berikut.

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Adapun tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman sebagai berikut.

Tabel 3.19 Tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20
2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5
3	Pengawalan	10
4	Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15
5	Bimtek Komunitas	15
6	Fasilitasi Keamanan Pangan	10
7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10
8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan	10
9	Lomba Desa Pangan Aman	5

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel 3.20 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	12.00	20.00	-	-	0.00	0.00	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Pada TW I belum dilakukan tahapan program Desa Pangan Aman karena sebelumnya menunggu pelaksanaan *kick off meeting* Keamanan Pangan Terpadu yang akan dibuka oleh Kepala Badan POM RI. Setelah pelaksanaan *kick off meeting*, dilakukan koordinasi

ke pemerintah daerah yang menjadi lokus intervensi pada tanggal 29-30 Maret 2021 dan telah ditetapkan 7 Desa yang akan menjadi lokus intervensi yaitu Desa Pamboborang, Desa Buttu Baruga, Desa Tinambung, Desa Bukit Samang, Desa Betteng Desa Sulai dan Desa Onang (termasuk dalam kategori desa Stunting). Pemilihan desa ini adalah masukan dari instansi yang terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan BAPPEDA, dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa melalui program keamanan pangan seperti Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa, memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) khususnya di bidang pangan, Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata, Mempunyai potensi pengembangan industri berbasis pangan Lokal, mempunyai sumber daya Lokal melimpah dan beberapa pertimbangan lainnya.

Dari hasil koordinasi tersebut juga telah diperoleh kesepakatan terkait waktu pelaksanaan Advokasi Kegiatan Terpadu PJAS, GKPD, dan PPABK yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 12 April 2021. Balai POM di Mamuju juga telah memberikan informasi ke- 5 Desa yang telah diintervensi di Tahun 2020 terkait akan diadakannya kegiatan pengawalan desa yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2021, selain itu tetap dilakukan KIE secara online melalui Whatsapp Group berupa infografis yang terkait keamanan pangan serta informasi lainnya dibidang Obat dan Makanan (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik).

IKU 18. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target sebanyak 1 pasar. Pasar adalah pasar tradisional yang

diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya

Adapun tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman sebagai berikut.

Tabel 3.21 Tahapan dan bobot Indikator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi	20
2	Survey Pasar	5
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20
5	Penyuluhan	5
6	Kampanye	5
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20
8	Lomba Pasar Aman	10
Total		100

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel 3.21 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2.00	20.00	-	-	0.00	0.00	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Pada triwulan I belum dilakukan tahapan program Pasar Aman karena sebelumnya menunggu pelaksanaan *kick off meeting* Keamanan Pangan Terpadu yang akan dibuka oleh Kepala Badan POM RI. Setelah pelaksanaan *kick off meeting*, dilakukan koordinasi ke pemerintah daerah yang menjadi lokus intervensi pada tanggal 29-30 Maret 2021 dan telah ditetapkan 1 Pasar yang akan menjadi lokus intervensi yaitu Pasar Pakkola Majene berdasarkan usulan dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (KOPDAGRIN) Kabupaten Majene. Dari hasil koordinasi tersebut juga telah diperoleh kesepakatan terkait waktu pelaksanaan Advokasi Kegiatan Terpadu PJAS, GKPD, dan PPABK yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 12 April 2021.

Komunikasi yang baik juga tetap dilakukan kepada Tim pengawas/pengelola Pasar yang diintervensi Tahun 2020 dan akan segera dikirimkan produk informasi keamanan pangan berupa buku yang dapat dijadikan acuan dalam menjaga keamanan pangan di pasar tradisional dan juga poster yang dapat dijadikan media penyebaran informasi di pasar yang dikelolanya.

Terhadap pasar yang diintervensi tahun 2019 juga tetap dilakukan kerjasama, dimana pada tanggal 27 Maret 2021 dilakukan KIE dan operasionalisasi mobling di pasar tersebut dengan hasil pengujian keseluruhan sampel negative dari kandungan Bahan berbahaya boraks, formalin, metanil yellow dan rodamin B.

SASARAN KEGIATAN 6

“Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju yang optimal”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 6 (SK7) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6 tahun 2021 disajikan dalam berikut.

Tabel 3.22 Capaian Sasaran Kegiatan 6

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	21.33	-	-	34.21	160.38	40.25	SANGAT KURANG
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	77.00	21.33	-	-	12.61	59.12	16.38	SANGAT KURANG
SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							109.75	28.31	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPKDiolah Penyusun, 2021

Standar adalah sesuai standar pada pedoman sampling tahun 2021. Parameter pengujian pada TW 1 sudah dilakukan 100% sesuai

pedoman sampling tahun 2021. Adanya kebijakan jumlah target sampling yang bertambah menyebabkan adanya kendala dalam perencanaan kebutuhan laboratorium yang dilakukan di awal tahun. Upaya yang dilakukan untuk tetap meningkatkan kinerja Balai POM di Mamuju adalah dengan memaksimalkan sarana dan prasana serta sumber daya yang ada.

Berikut dijelaskan analisis setiap indikatornya.

IKU 19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling tahun 2021. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.22 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	21.33	-	-	34.21	40.25	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Pada Bulan Januari - Februari tidak dilakukan kegiatan pengujian karena fasilitas tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian. Bulan Maret baru dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Makassar. Adapun beberapa kendala/hambatan yang menjadi penyebab capaian target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju sangat kurang adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan reagen pengujian karena sedang menunggu pengadaan
- Keterbatasan alat sehingga ada beberapa parameter yang tidak dapat dilakukan pengujiannya
- Jadwal Rencana pelaksanaan sampling mundur akibat gempa
- Tidak tersosialisasinya update terbaru SOP Mikro tentang timeline pengujian
- Tenaga penguji pangan mendapat tugas tambahan sebagai penguji sampel Covid-19
- Terdampak bencana gempa bumi 6.2 Magnitudo di Sulawesi Barat

Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di atas adalah

- Memaksimalkan penggunaan reagen yang masih tersedia
- Pengujian dilakukan berdasarkan Metode analisa yang sesuai dengan kondisi laboratorium
- Sosialisasi SOP Mikro Pengujian secepatnya

IKU 20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.23 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	77.00	21.33	-	-	12.61	16.38	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Pada Bulan Januari - Februari tidak dilakukan kegiatan pengujian karena fasilitas tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian. Bulan Maret baru dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Makassar. Adapun beberapa kendala/hambatan yang menjadi penyebab capaian target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju sangat kurang adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan reagen pengujian karena sedang menunggu pengadaan

- Keterbatasan alat sehingga ada beberapa parameter yang tidak dapat dilakukan pengujiannya
- Jadwal Rencana pelaksanaan sampling mundur akibat gempa
- Tidak tersosialisasinya update terbaru SOP Mikro tentang timeline pengujian
- Tenaga penguji pangan mendapat tugas tambahan sebagai penguji sampel Covid-19
- Terdampak bencana gempa bumi 6.2 Magnitudo di Sulawesi Barat

Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di atas adalah

- Memaksimalkan penggunaan reagen yang masih tersedia
- Pengujian dilakukan berdasarkan Metode analisa yang sesuai dengan kondisi laboratorium
- Sosialisasi SOP Mikro Pengujian secepatnya

SASARAN KEGIATAN 7

“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 7 (SK7) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Penindakan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over* tahun $n-1$. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Adapun capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini.

IKU 21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	49.00	20.00	-	-	42.50	212.50	86.73	CUKUP
SK7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							212.50	86.73	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja indikator kinerja pada SK7 tahun 2021 sebesar 86,73% dengan target 49,00% dan realisasi sebesar 42,50%. Capaian dari SK7 termasuk dalam kriteria “cukup”. Target tahun 2021 ditetapkan berdasarkan pertimbangan atas capaian-capaian sebelumnya dan jumlah SDM yang dimiliki. Capaian TW I tahun 2021 yaitu 3 perkara tahun n. Adapun tahap penanganannya yaitu 1 perkara Tahap 1 dan 2 perkara tahap P18/19. Capaian perkara ini merupakan capaian insidental yang merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari Deputy 4. Perkara insidental menyebabkan capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju menjadi cukup tinggi. Balai POM di Mamuju terus berupaya menjalin komunikasi yang aktif dengan lintas sektor terkait untuk mempertahankan capaian atas indikator ini.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini di dukung oleh output Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Barat. Adapun kegiatan yang mendukung meliputi pengumpulan bahan keterangan, verifikasi informasi dan rencana investigasi (operasi intelijen), pelaksanaan pendalaman informasi, evaluasi hasil pendalaman informasi, gelar kasus dan pelaporan, rapat pembahasan rencana penyidikan, skenario penindakan dan olah TKP, pemusnahan barang bukti, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, gelar perkara dan bantuan hukum. Selain itu perlu dilakukan kegiatan revisi anggaran karena akan dilakukannya pelatihan terkait penyidikan di Balai POM di Mamuju.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya yaitu capaian ini bisa akan dijadikan acuan untuk menaikkan target perkara di TW II tahun 2021. Rencananya target akan dinaikkan menjadi 4 Perkara. Kegiatan penindakan rutin dapat dilakukan secara lebih intens dan tetap menjadi hubungan lintas sektor untuk mempertahankan agar indikator ini bisa tercapai dengan

baik dan perkara bisa diselesaikan hingga tahap 2. Adapun kegiatan-kegiatan yang sebaiknya tetap dapat dilakukan meliputi pengumpulan bahan keterangan, verifikasi informasi dan rencana investigasi (operasi intelijen), pelaksanaan pendalaman informasi, evaluasi hasil pendalaman informasi, gelar kasus dan pelaporan, rapat pembahasan rencana penyidikan, skenario penindakan dan olah TKP, pemusnahan barang bukti, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, gelar perkara dan bantuan hukum.

SASARAN KEGIATAN 8

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 8 (SK8) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.28 Capaian Sasaran Kegiatan 8

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal							Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian atas persentase capaian kinerja pada SK8 dihitung di akhir tahun. Hasil nilai AKIP dari Ittama dan Indeks RB merupakan Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM. Berikut penjelasan terkait masing-masing indikator.

IKU 22. Indeks RB Balai POM di Mamuju

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021.

IKU 23. Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

Nilai AKIP Balai POM di Manokwari dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat

Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021.

SASARAN KEGIATAN 9

“Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 9 (SK9) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 triwulan III tahun 2021 disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut.

IKU 24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju

Tabel 3.31 Capaian Sasaran Kegiatan 9

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	77.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal							Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021.

SASARAN KEGIATAN 10

“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 10 (SK10) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 tahun 2021 disajikan dalam tabelberikut.

Tabel 3.32 Capaian Sasaran Kegiatan 10

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	75.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	Capaian di Akhir Tahun	-
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.00	2.00	-	-	-	Capaian TW I Belum Keluar	Capaian TW I Belum Keluar	-
SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju							Capaian TW I Belum Keluar	Capaian TW I Belum Keluar	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Belum terdapat capaian dari SK10 karena persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP akan tercapai di akhir tahun dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal juga belum keluar pada TW I tahun 2021. Berikut ini Analisa atas setiap Indikator Kinerja SK10.

IKU 25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	75.00	-	-	-	-	Capaian di Akhir Tahun	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2021. Namun kemungkinan capaian dari SK10

belum tercapai di tahun 2021 karena adanya kendala Pasca Gempa Bumi 6,2 Magnitudo di Sulawesi Barat. Adapun kendala yang menyebabkan belum tercapai dengan optimal sebagai berikut.

- Anggaran pemenuhan alat laboratorium dialihkan pada pembangunan gedung yang terdampak gempa
- Anggaran untuk reagen dan alat pendukung pengujian dikurangi
- Tahun 2021 belum adanya peningkatan kompetensi pegawai untuk SRL (Standar Ruang Lingkup) Laboratorium

Tindak lanjut yang akan di lakukan untuk meningkatkan capaian kinerja di atas adalah

- Mengajukan pengusulan ulang untuk peningkatan kompetensi pegawai melalui BIMTEK, Magang dan Supervisi
- Membuat perencanaan ulang untuk anggaran pemenuhan alat dan reagen laboratorium

IKU 26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan,

selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.
 2. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.00	2.00	-	-	-	Capaian TW I Belum Keluar	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di TW 1 tahun 2021 karena realisasi dan capaiannya dihitung oleh Pusdatin dan dalam dashboard BCC Balai POM di Mamuju juga belum terdapat capaian atas indikator diatas. Namun terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian indikator yaitu:

- Masih adanya kendala dalam penginputan Data dan informasi pengujian triwulan I pada SIPT oleh operator sampling di bidang

pemeriksaan, hal tersebut menyebabkan keterlambatan pembuatan SPK (surat perintah kerja) pada bidang pengujian.

- Belum optimalnya penggunaan email maupun berita actual pada subsite Balai POM di Mamuju.

Adapun Tindak lanjut dalam meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah akan dilakukan koordinasi dengan petugas operator pada SIPT untuk dapat menginput secara cepat data ke dalam SIPT dan meningkatkan konsistensi komunikasi melalui email corporate dan lebih intens membuat berita aktual pada subsite Balai POM di Mamuju.

SASARAN KEGIATAN 11

“Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 11 (SK11) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.35 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94.00	25.00	-	-	35.53	142.13	37.80	SANGAT KURANG
IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	92.00	92.00	-	-	75.00	81.52	81.52	CUKUP
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel							111.82	59.66	KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian kinerja 2 (dua) indikator kinerja pada SK7 triwulan I tahun 2021 berkisar antara 37.80 s/d 81.52%. Capaian dari SK11 yaitu 59.66% termasuk dalam kriteria “Kurang”. Hal ini disebabkan karena salah satu Indikator yaitu Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri dari Evaluasi Kinerja Anggaran nilainya belum keluar dari

Kementerian Keuangan pada Triwulan I Tahun 2021 maka yang dihitung hanyalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Berikut ini Analisa atas setiap Indikator Kinerja.

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bersifat flat dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang bersifat kumulatif. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian indikator ini dihitung dengan rumus Berikut.

Nilai Kinerja Anggaran BPOM =

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator tahun 2021.

Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94.00	25.00	-	-	35.53	37.80	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju pada TW I tahun 2021 sebesar 37.80% dengan realisasi sebesar 35.53%. Hal ini disebabkan karena salah satu Indikator yaitu Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) nilainya kumulatif dan belum keluar pada TW I tahun 2021, capaian ini belum keluar karena adanya update sistem Smart yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan nilai yang sifatnya tetap atau flat Adapun capaian IKPA TW 1 sebesar 88,83 yang menyebabkan nilai rendah yaitu komponen penyerapan anggaran dengan nilai akhir sebesar 7,85 dan komponen kesalahan SPM dengan nilai akhir sebesar 4. Berikut merupakan tabel rinci nilai IKPA TW 1.

Tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan terhadap indikator-indikator pembentuk IKPA. Selain itu juga dilaksanakan koordinasi dengan bagian terkait yang menjadi penanggung jawab masing-masing indikator IKPA di Tahun 2021.

Tabel 3.37 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas				Kesalahan SPM
1	178	419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	52.33	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	64.85	73%	88.83	
				Bobot	5	0	5	10	8	5	5	15	10	0	5	0				5
				Nilai Akhir	5.00	0.00	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	7.85	10.00	0.00	5.00	0.00				4.00
				Nilai Aspek	200.00			100.00			84.11				80.00					
Disclaimer:																				
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output																				

Sumber : aplikasi Omspan Per 5 Maret 2021, 2021

IKU 28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\text{IE} = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1.

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$\text{TE} = (\text{IE} - \text{SE}) / \text{SE}$$

Apabila $\text{IE} \geq \text{SE}$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $\text{IE} \leq \text{SE}$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $\text{TE} < 0$ atau $\text{TE} > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien

9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien

10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator tahun 2021.

Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	92.00	92.00	-	-	75.00	81.52	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju pada TW I tahun 2021 sebesar 81,52 termasuk kriteria cukup dengan realisasi sebesar 75. Dihitung menggunakan perhitungan dan kriteria diatas, capaian output pada TW I sebesar 48.59 dan input yang digunakan sebesar 7,85 sehingga indeks efisiensi sebesar 6,19 dengan capaian 75% masuk kedalam katagori Tidak Efisien. Hal ini terjadi karena rendahnya penyerapan anggaran pada TW 1 tahun 2021. Salah satunya disebabkan karena adanya gempa bumi 6,2 Magnitudo yang menyebabkan kegiatan perkantoran tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan. Rendahnya penyerapan anggaran belanja modal pada TW 1 karena sedang dilakukan penilaian kelayakan gedung dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga belanja modal dilakukan revisi tidak ada belanja dan dialihkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagai tindaklanjutnya telah dilakukan rapat monitoring TW I dan dilakukan update POA Kegiatan dan Anggaran untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran dan capaian kinerja output dapat berjalan selaras dan seimbang. Selain itu juga dilakukan revisi terhadap anggaran pasca gempa bumi.

3.2 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Bentuk akuntabilitas keuangan Balai POM di Mamuju Tahun 2021 yaitu melalui penyampaian Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan ke BPOM RI sebagai Eselon I.

Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	$i = (h/g \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	135,343,762	8,280,695	6.12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	87,436,429	3,570,621	4.08
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Obat yang aman dan	135,343,762	8,280,695	6.12

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	$i = (h/g \times 100)$
	memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	87,436,429	3,570,622	4.08
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	368,500,000	9,850,000	2.67
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	64,547,900	-	0.00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan	127,065,400	8,642,069	6.80

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	$i = (h/g \times 100)$
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	337,500,000	9,850,000	2.92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	138,129,900	8,642,069	6.26
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	138,129,900	8,642,069	6.26
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan	11,064,500	-	0.00

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	$i = (h/g \times 100)$
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	22,483,400	-	0.00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	104,582,000	8,642,069	8.26
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	368,500,000	9,850,000	2.67
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	368,500,000	9,850,000	2.67
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Jumlah sekolah dengan	688,161,000	5,646,983	0.82

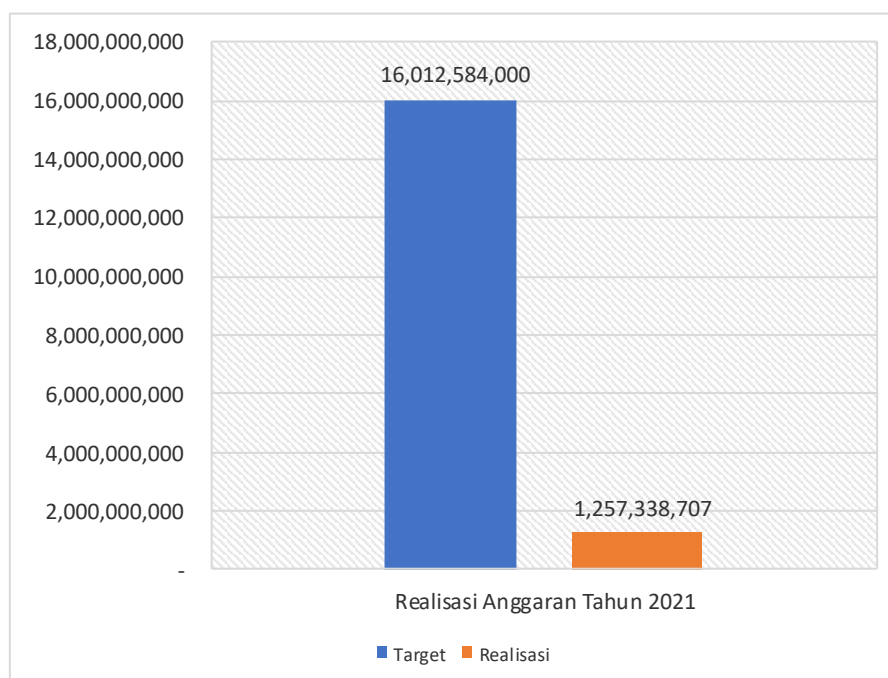
No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	$i = (h/g \times 100)$
	informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	876,091,000	-	0.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	105,098,000	-	0.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	135,343,762	8,280,695	6.12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	87,436,428	3,570,621	4.08
7	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan	218,613,000	32,367,018	14.81

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	$i = (h/g \times 100)$
	kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	3,063,000,000	-	0.00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	543,507,500	85,190,846	15.67
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	543,507,500	85,190,846	15.67
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	2,145,784,428	12,571	0.00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	1,703,826,000	313,136,072	18.38
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	1,703,826,000	313,136,073	18.38

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	$i = (h/g \times 100)$
	Akuntabel				
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	1,703,826,000	313,136,073	18.38
Total			16,012,584,000	1,257,338,707.00	7.85

Sumber: Monev Anggaran, 2021

Berikut ini grafik total realisasi anggaran Tahun 2021



Gambar 3.30 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Sumber : Monev Anggaran Disusun oleh Penyusun, 2021

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen DIPA Balai POM di Mamuju 2021 sebesar Rp16.012.584.000 realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.257.338.707 atau 7,85%. Adapun Realisasi Anggaran Per Belanja sebagai berikut.

Tabel 3.40 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

PAGU DAN REALISASI BELANJA													
No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja								Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	
1	063-419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMLUU	178	PAGU REALISASI PERSENTASE	3,378,450,000 696,006,446 (20.60%)	7,477,970,000 561,332,261 (7.51%)	5,156,164,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	16,012,584,000 1,257,338,707 (7.85%)
				SISA	2,682,443,554	6,916,637,739	5,156,164,000	0	0	0	0	0	14,755,245,293
TOTAL					PAGU REALISASI PERSENTASE	3,378,450,000 696,006,446 (20.60%)	7,477,970,000 561,332,261 (7.51%)	5,156,164,000 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	16,012,584,000 1,257,338,707 (7.85%)
					SISA	2,682,443,554	6,916,637,739	5,156,164,000	0	0	0	0	14,755,245,293

Sumber: Aplikasi Omspan, 2021

Balai POM di Mamuju telah berupaya mengelola anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan pengelolaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Mamuju dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran beserta pemenuhan kegiatan secara berkala.
- Revisi anggaran dan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- Optimalisasi kegiatan yang sudah tercapai.
- Melakukan revisi DJA terkait dengan renovasi gedung laboratorium yang rusak akibat gempa bumi

Faktor penyebab belum optimalnya realisasi anggaran antara lain:

- Pada Triwulan 1 sedang dilakukan penilaian kelayakan gedung dan rencana rehabilitasi rekonstruksi, sehingga belanja modal di lakukan revisi tidak ada belanja
- Adanya gempa Bumi dengan Magnitudo 6,2 Tanggal 15 Januari 2021 dan gempa susulannya menyebabkan lumpuhnya pelayanan perkantoran BPOM Mamuju di bulan Januari 2021 dan awal februari

sehingga penyerapan belanja mengikat dan belanja barang tidak sesuai perencanaan.

- Gempa juga menyebabkan rusaknya gedung laboratorium yang terdiri dari 2 rusak ringan dan 1 rusak berat, sehingga harus dilakukan renovasi dan pembangunan gedung baru yang menyebabkan seluruh anggaran belanja modal dan sebagian belanja barang akan dilakukan revisi dan dialihkan untuk mendukung percepatan pembangunan gedung.
- Gempa juga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan di TW I dijadwalkan ulang untuk dilakukan di TW II.
- Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan metode pelaksanaan kegiatan juga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran di Triwulan I

Agar realisasi anggaran lebih optimal perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan reviu anggaran dan melakukan revisi DJA terkait dengan pembangunan gedung laboratorium yang rusak akibat gempa bumi.
- Mereviu kembali kegiatan terpadu yang tidak terlaksana untuk dialihkan ke kegiatan lain
- Dilakukan perencanaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal lebih cermat.
- Peningkatan kompetensi SDM yang ada diberbagai bidang terkait penyerapan anggaran dan kegiatan untuk menyelaraskan realisasi kegiatan dan anggaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kegiatan dan anggaran dimasing-masing kelompok substansi.
- Proses realisasi anggaran dilakukan sesuai perencanaan agar tidak menumpuk di akhir tahun.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Balai POM di Mamuju sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Sejak tahun 2020 Balai POM di Mamuju sudah menyusun Laporan Kinerja Interim sebagai bentuk perwujudan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Mamuju kepada Kepala BPOM RI secara Triwulanan, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Pada tahun 2021, Balai POM di Mamuju memiliki tantangan yang cukup besar yaitu adanya Gempa Bumi tanggal 15 Januari 2021 dengan kekuatan 6,2 Magnitudo dan pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Keadaan ini menjadikan perubahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan kegiatan Balai POM di Mamuju dan kebijakan-kebijakan Daerah dan Nasional yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Gempa Bumi tersebut berdampak pada kerusakan talud dan 3 (tiga) gedung laboratorium Balai POM di Mamuju tidak menurunkan semangat kerja seluruh Balai POM di Mamuju untuk mencapai kinerja yang optimal. Peristiwa gempa bumi tersebut diubah menjadi kekuatan untuk dapat menjadi lebih kompak dan semangat membantu saudara-saudara dan masyarakat di Sulawesi Barat yang lebih terdampak dan membutuhkan bantuan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai 1 (Satu) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK yaitu SK4 *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju*. Hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di

Mamuju dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju. Hal ini sesuai dengan misi Balai POM di Mamuju yaitu: *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.* Terkait dengan anggaran, pagu anggaran Balai POM Mamuju tahun 2021 sebesar Rp16.012.584.000 dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp1.257.338.707 atau 7,85%.

Demi meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Mamuju terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan, dengan peningkatan kinerja dan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

4.2 Saran

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki capaian kinerja Balai POM di Mamuju perlu dilakukan beberapa upaya antara lain

1. Melakukan inovasi agar tetap bekerja efektif dan efisien
2. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap strategi maupun target pencapaian indikator kinerja
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya Balai POM di Mamuju baik dari segi SDM, penganggaran dan infrastruktur
4. Meningkatkan cakupan pengawasan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Meningkatkan pelayanan publik Balai POM di Mamuju dengan melakukan perbaikan sistem pelayanan registrasi untuk efisiensi layanan publik
6. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan baik untuk *premarket evaluation* maupun *postmarket surveilan*

7. Demi meningkatkan sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang optimal di perlukan dukungan sumber daya dan dana yang cukup, serta sarana dan prasarana yang memadai.

LAMPIRAN

1. Target Kinerja Jangka Menengah Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.8	83.6	86.6	90	92.3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80	82	84	86	88
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	69	73	76	79	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83	84.5	86	87.5	89
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	71	74	77	80	83

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju	Balai POM di Mamuju					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85	86,75	88,5	91	92
Internal Process Perspective						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	52,6	60,7	68,8	76,9	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80	82	84	86	88
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50	55	60	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	51	53	55	58	60
	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.11	3.46	3.81	4.16	4.51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	75	78	81	85
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	82	102

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82	85	88	91	94
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	75	77	80	83	85
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	44	49	55	60	65
Learning & Growth Perspective						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	80	84	89	91	92
Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	75	77	80	82	85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
berkinerja optimal						
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	70	75	80	85	90
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

2021

BALAI POM DI MAMUJU

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.04.03.122.05.20.309 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai POM di Mamuju Nomor HK.04.03.122.05.20.910 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2021.



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kelukku, KM. 13 Bumbu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpmamuju@gmail.com

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MAMUJU

Netty Nurmuliawaty

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.04.03.122.05.20.909 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,75

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	80
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3,46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	79,18
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	49

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja Balai POM di Mamuju		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89
		Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (92%)

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MAMUJU



Netty Nurmuliawaty



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Paras Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpo-mamuju@gmail.com , ulakmamuju@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt., M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 22 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt., M.Kes

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Mamuju	86,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	80

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3,46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	79,18
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	49

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

Email: bpcmmamuju@gmail.com, bpcmmamuju@gmail.com

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	di Mamuju		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89
		Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (92%)

Kegiatan**Anggaran**

3165. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp 10.901.106.000
6384. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp 5.111.478.000

Mamuju, 22 Desember 2020

Kepala Badan POM**Kepala BPOM di Mamuju**


Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dra. Netly Nurmuliawaty, Apt., M.Kes



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poreas Mamuju - Kolukku, KM.13 Bambi, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322799

Email : bpo@mamuju.go.id, uip@mamuju.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	135,343,762.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	87,436,429.00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	135,343,762.00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	87,436,429.00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	73	368,500,000.00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84,5	64,347,900.00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	127,065,400.00



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bembu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : basemamju@ymail.com., dikanemju@ymail.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Mamuju	-	-	-	86,75	337,500,000.00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	80	80	80	80	138,129,900.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,7	60,7	60,7	60,7	138,129,900.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	82	82	82	11,064,500.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	22,483,400.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	53	53	53	104,582,000.00
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	-	-	-	3,46	368,500,000.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	79,18	79,18	79,18	79,18	368,500,000.00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	50%	80%	40	688,161,000.00
		Jumlah desa pangan aman	20%	50%	80%	12	876,091,000.00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	50%	80%	2	105,098,000.00

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Peres Mamuju - Kakadu, KM.13 Bamba, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322799

Email : basmamuju@gmail.com , upbmamuju@gmail.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Mamuju						
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21,33	51,87	71,18	85	135,343,762.00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21,33	49,33	66,67	77	87,436,428.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	40	49	218,613,000.00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	-	-	-	89	3,063,000,000.00
		Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	-	-	-	84	543,507,500.00
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	-	-	-	77	543,507,500.00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	75	2,145,784,428.00



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukiki, KM 13 Berek, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , upimamuju@gmail.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengolahan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2	2	2	2	1,703,826,000.00
11	Terlaksananya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	25	50	75	94	1,703,826,000.00
		Tingkat Efisiensi	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien	1,703,826,000.00
		Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	(92%)	(92%)	(92%)	(92%)	

Mamuju, 22 Desember 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU



Dra. Nelly Gusnuliawaty, Apt., M.Kes



REFORMASI BIROKASI **BALAI POM DI MAMUJU**

Menuju Zona Integritas WBK/WBBM
berkomitmen untuk memberikan pelayanan
yang sesuai dengan standart yang ditetapkan,
apabila tidak siap menerima sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Petugas Balai POM di Mamuju **TIDAK** menerima
hadiah/bingkisan dalam bentuk apapun.

LAPORAN
KINERJA
Interim Triwulan I
2021
BALAI POM DI MAMUJU



Jalan Poros Mamuju-Kalukku KM. 13,
Bambu, Sulawesi Barat



(0426) 2322759



bpom_mamuju@pom.go.id